

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelapa sawit adalah salah satu tanaman perkebunan yang menjadi sumber penghasil devisa non migas bagi Indonesia. Komoditi minyak sawit memiliki prospek yang sangat cerah bagi perdagangan minyak nabati dunia, Oleh karena itu mendorong pemerintah Indonesia untuk mengembangkan areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia Saat ini, kelapa sawit Indonesia telah berkembang menjadi bagian yang paling penting di dunia. Dalam hal produksi minyak sawit, Indonesia saat ini menjadi nomor satu dan telah mengalahkan Malaysia. Dari 64 juta ton produksi sawit dunia, Indonesia menyumbang lebih dari setengahnya yaitu 35 juta ton. Indonesia menyumbang 54 persen dari produksi minyak sawit dunia.

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas hasil perkebunan yang mempunyai peran cukup penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia karena kemampuannya menghasilkan minyak nabati yang banyak dibutuhkan oleh sektor industri. Sifatnya yang tahan oksidasi dengan tekanan tinggi dan kemampuannya melarutkan bahan kimia yang tidak larut oleh bahan pelarut lainnya, serta daya melapis yang tinggi membuat minyak kelapa sawit dapat digunakan untuk beragam peruntukan, diantaranya yaitu untuk minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar (biodiesel). Sebagai negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk memasarkan minyak sawit dan inti sawit baik di dalam maupun luar negeri.

Kelapa sawit tidak hanya telah menjelma menjadi penyumbang paling penting devisa negara dari nilai ekspor yang terus meningkat, namun juga menjadi penggerak perekonomian wilayah, menyerap tenaga kerja dan mengentaskan kemiskinan di pedesaan. Kelapa sawit telah berkembang dari luas 300 ribu ha di tahun 1980 menjadi saat ini 16,1 juta ha (menurut data GAPKI), dengan produksi CPO sebesar 40 juta ton. Perlu disampaikan bahwa pangsa perkebunan rakyat terus meningkat, dan saat ini telah menjadi 52 persen dari seluruh luas kebun. Luas total perkebunan rakyat diduga telah

mencapai 9 juta ha, bukan lagi 6 juta ha sebagaimana sering diberitakan. Sementara, luas kebun kelapa sawit BUMN relatif sedikit yakni hanya 515 ha.

Keseluruhan kebun sawit tersebut telah mampu menyerap 4,2 juta orang tenaga kerja untuk sawit rakyat, namun secara keseluruhan adalah 8,2 juta orang. Sawit juga menjadi sumber penghidupan bagi 1,5 juta keluarga petani kecil. Secara ekonomi, sawit telah berperan sebagai kontributor ekonomi utama wilayah, dalam setidaknya 31 kabupaten dan kota di Indonesia.

Provinsi Riau merupakan produsen kelapa sawit terbesar di Indonesia. Areal perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau meningkat dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 2002 areal perkebunan kelapa sawit mencapai 1.313.467 ha dengan jumlah produksi 3.697.552 ton. Pada tahun 2019 luas areal perkebunan di provinsi Riau sangat meningkat mencapai 2 822 672 ha dengan jumlah produksi mencapai 9 869 230 Ton (Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2019).

Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu wilayah yang memiliki perkebunan kelapa sawit yang pertumbuhannya sangat pesat di Provinsi Riau. Luas areal kelapa sawit tahun 2019 tercatat 325.24,00 ha dengan jumlah produksi mencapai 1.339.609. Ton Kecamatan Pangkalan Kuras merupakan kecamatan yang memiliki areal tanaman kelapa sawit terluas pada tahun 2019 memiliki luas yaitu 73 520,00 ha dengan total produksi selama 2019 sebesar 360 530 ton (Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2019). Perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Pangkalan Kuras telah dioperasikan sejak tahun 1990an. Oleh karena itu sebagian besar dari tanaman kelapa sawit tersebut pada saat ini telah memasuki tahap akhir siklus produksi sehingga perlu direncanakan kegiatan replanting. Petani di desa surya indah yang sedang melaksanakan replanting adalah anggota dari Kud Brata Jaya.

Replanting merupakan proses peremajaan kebun kelapa sawit yaitu dengan mengganti pohon kelapa sawit yang telah berusia 20-25 tahun dengan pohon kelapa sawit yang baru karena pohon kelapa sawit yang telah berusia 20-25 tahun tidak lagi produktif hasilnya semakin menurun setiap bulannya. Pohon kelapa sawit ini bisa saja tidak dilakukan replanting tetapi pohon sawit

yang telah berusia tua ini tidak lagi memberi manfaat yang besar kepada pemiliknya karena tidak produktif dan hasilnya sedikit. Sesuai dengan daur umur teknis budi daya tanaman kelapa sawit yang harus mulai di remajakan setelah berumur 20 tahun keatas.

Peremajaan kelapa sawit sering kali ditunda dalam pelaksanaannya dikarenakan berbagai masalah yang dialami oleh petani rakyat. Petani pada umumnya dihadapkan pada masalah permodalan dalam melakukan peremajaan. Petani tidak mempersiapkan dana untuk peremajaan sehingga harus mencari pinjaman dana. Permasalahan lain yang dihadapi dalam melakukan replanting adalah bagaimana kesiapan petani untuk memenuhi kebutuhan hidup di masa replanting yaitu pendapatan lain. Adakah sumber pendapatan lain yang didapat petani di saat replanting.

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) mendorong peningkatan produktifitas perkebunan kelapa sawit rakyat. Melalui pendudukan pendanaan replanting perkebunan kelapa sawit milik petani, diharapkan tak hanya produktifitas perkebunan yang meningkat, tetapi berkelanjutan kedepan. Petani kelapa sawit memiliki peran penting bagi pertumbuhan perkebunan kelapa sawit nasional, dimana luas lahan perkebunan kelapa sawit nasional lebih dari 42% merupakan milik petani rakyat. Salah satu upaya meningkatkan produktifitas tanaman kelapa sawit rakyat melalui program peremajaan sawit rakyat (PSR). Program itu telah mendorong banyak petani untuk mendapatkan bantuan pendanaan. Dengan bantuan itu, Pemerintah berharap bisa membantu meringankan modal yang harus dikeluarkan petani. Sebab biaya peremajaan sawit rakyat menurut hitungan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian mencapai Rp.68 juta per Hektare (ha). Keberpihakan pemerintah terhadap perkebunan kelapa sawit rakyat, salah satunya dilatar belakangi oleh besarnya jumlah serapan tenaga kerja di sektor ini. Banyak rakyat Indonesia berprofesi sebagai petani kelapa sawit yang mengolah lahannya untuk mencari penghidupan.

Masalah biaya inilah yang membuat petani kelapa sawit ada yang setuju dan tidak setuju untuk melakukan replanting, karena tidak semua petani kelapa

sawit memiliki kebun lebih dari satu maka para petani kelapa sawit ini merasa keberatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja akan sulit apalagi harus mengeluarkan biaya yang besar untuk proses replanting tersebut. Semua para petani kelapa sawit sudah mengetahui bahwa kebun kelapa sawitnya akan dilakukan peremajaan (replanting) sehingga banyak dari mereka yang sudah bersiap-siap mencari cara untuk tetap dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak sedikit masyarakat yang sudah memiliki kebun kelapa sawit yang lain sebagai ganti kebun kelapa sawit yang akan dilakukan peremajaan, namun tetap masih banyak juga dari para petani kelapa sawit yang tidak siap menghadapi peremajaan kebun (replanting) ini mereka tidak siap karena mereka tidak memiliki kebun kelapa sawit untuk mengganti kebun kelapa sawit yang akan di remajakan (replanting), kemudian selain itu mereka juga tidak memiliki tabungan untuk replanting bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari jika kebun nya di remajakan (replanting) saja sulit.

Dalam program ini BPD PKS menyalurkan bantuan dana kepada pekebun rakyat peserta PSR sebesar Rp30 juta per ha/pekebun. Terdapat tiga model skema pembiayaan yang bisa diterapkan dalam program ini berdasarkan kemampuan pekebun. Skema pertama adalah kebutuhan biaya dipenuhi dari dana bantuan BPD PKS sebesar Rp30 juta/ha/pekebun ditambah dengan dana tabungan milik pekebun. Pada skema ini petani tidak perlu untuk melakukan kredit usaha rakyat dikarenakan tabungan milik petani sudah mencukupi untuk melakukan replanting ditambah dengan dana bantuan dari BPD PKS.

Skema kedua adalah kebutuhan dana pembiayaan dipenuhi tiga sumber, yakni memanfaatkan dana bantuan BPD PKS, Tabungan petani dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari pekebun. Pada skema ini petani perlu melakukan kredit usaha rakyat dikarenakan tabungan petani tidak mencukupi untuk melakukan peremajaan.

Sedangkan pada skema ketiga, dana pembiayaan diperoleh dari dua sumber yakni bantuan BPD PKS dan KUR. Pada skema ini petani tidak memiliki tabungan untuk melakukan peremajaan, maka petani perlu melakukan kredit usaha rakyat untuk mencukupi biaya dalam peremajaan Adanya

keragaman antar petani dalam mendapatkan sumber permodalan menyesuaikan dengan kemampuan petani untuk melakukan peremajaan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Petani mendapatkan sumber permodalan dalam melakukan peremajaan
2. Bagaimana sumber pendapatan lain yang didapat petani untuk memenuhi kebutuhan hidup di saat peremajaan

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana petani mendapatkan sumber modal untuk melakukan peremajaan
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya petani mendapatkan sumber pendapatan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup di masa peremajaan

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Penelitian ini untuk mengetahui kesiapan petani dalam menghadapi peremajaan dan permodalan yang disiapkan petani dalam melakukan peremajaan dan mengetahui sumber pendapatan lain yang didapat petani untuk memenuhi kebutuhan hidup di masa peremajaan serta untuk memenuhi persyaratan dan menyelesaikan studi untuk memperoleh derajat sarjana jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Stiper Yogyakarta.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi kepada para petani kelapa sawit tentang persiapan dan permodalan dalam melakukan peremajaan dan mengetahui sumber pendapatan lain petani untuk memenuhi kebutuhan hidup di masa peremajaan.